

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Kondisi ini dapat diamati melalui peningkatan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh akumulasi modal tetap, seperti infrastruktur dan fasilitas produksi, serta ketersediaan tenaga kerja yang produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan output yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sementara itu, pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat. Arsyad (2004) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan pendapatan riil per kapita, yang disertai dengan perbaikan dalam sistem kelembagaan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan output, tetapi juga mencakup aspek struktural dan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Proses ini tercermin dari kenaikan pendapatan nasional riil yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Mankiw (2019) menjelaskan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan Neo-Klasik yang menekankan peran faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal dan peningkatan jumlah tenaga kerja, sedangkan teknologi berperan dalam meningkatkan produktivitas. Mankiw juga menekankan pentingnya tabungan dan investasi sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, model Neo-Klasik memiliki keterbatasan karena menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Oleh karena itu, dalam analisis modern, pertumbuhan ekonomi juga dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor internal, termasuk kebijakan pemerintah dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks penelitian ini, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja berperan sebagai faktor produksi yang menentukan kapasitas output, sementara penerimaan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi pasar mencerminkan peran kebijakan fiskal daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kombinasi antara

faktor produksi dan kebijakan fiskal menjadi dasar dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen merupakan pengembangan dari model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang berupaya menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Berbeda dengan model Neo-Klasik yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor internal seperti investasi dalam modal manusia, inovasi, serta kebijakan pemerintah.

Menurut Romer (1990), pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat dipengaruhi oleh akumulasi pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan melalui aktivitas penelitian dan pengembangan. Pengetahuan dipandang sebagai faktor produksi yang memiliki sifat non-rival, sehingga dapat menciptakan *increasing returns to scale* dalam perekonomian. Hal ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengalami penurunan hasil seperti dalam model Neo-Klasik.

Sejalan dengan itu, Lucas (1988) menekankan pentingnya modal manusia (*human capital*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Secara sederhana, model pertumbuhan endogen dapat dinyatakan dalam fungsi produksi:

$$Y = AK$$

di mana:

Y = Output

A = Tingkat teknologi atau pengetahuan

K = Modal fisik dan modal manusia

Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang dihasilkan secara internal. Selain faktor produksi, teori pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Barro (1990), kebijakan fiskal pemerintah, termasuk pengeluaran publik dan sistem perpajakan, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, teori pertumbuhan endogen menjadi grand theory yang paling relevan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Tenaga kerja merepresentasikan modal manusia yang berperan dalam meningkatkan produktivitas. PBB-P2 sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah mencerminkan peran pemerintah dalam menghimpun sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi. Sementara itu, retribusi pasar mencerminkan aktivitas sektor riil, khususnya perdagangan dan UMKM, yang berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi daerah.

Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen mampu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi semata, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, serta dinamika aktivitas ekonomi lokal. Berikut adalah rumus dari pertumbuhan ekonomi:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_t = Produk Domestik Bruto pada tahun/periode saat ini

$PDB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Bruto pada tahun/periode sebelumnya

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Permasalahannya

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan, dalam praktiknya proses pertumbuhan tidak selalu berjalan secara optimal dan merata. Terdapat berbagai permasalahan struktural maupun kontekstual yang dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Todaro dan Smith (2015), salah satu permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak merasakan manfaat dari peningkatan output ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan.

Selain itu, Mankiw (2019) menjelaskan bahwa keterbatasan akumulasi modal menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rendahnya tingkat investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, akan menghambat peningkatan kapasitas produksi. Dalam konteks daerah, keterbatasan penerimaan fiskal seperti pajak dan retribusi dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Permasalahan lain yang krusial adalah kualitas dan penyerapan tenaga kerja. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, struktur ekonomi daerah yang belum kuat juga menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti sektor primer atau sektor informal, menyebabkan perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal. Rendahnya produktivitas sektor riil, termasuk aktivitas perdagangan di pasar tradisional, dapat menghambat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, pengelolaan pajak dan retribusi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penerimaan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan retribusi pasar memiliki peran ganda. Di satu sisi, penerimaan tersebut menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Namun, di sisi lain, beban pajak dan retribusi

yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan mengurangi insentif investasi, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan penerimaan daerah juga menjadi tantangan. Kebocoran dalam sistem pemungutan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya alokasi belanja publik dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output semata, tetapi juga mencakup aspek distribusi, kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam literatur ekonomi, faktor-faktor tersebut mencakup aspek produksi, sumber daya manusia, teknologi, serta kebijakan pemerintah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi secara komprehensif (Todaro & Smith, 2015; Mankiw, 2019).

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal mencakup investasi dalam bentuk infrastruktur, mesin, dan aset produktif lainnya yang digunakan untuk meningkatkan

kapasitas produksi. Tingkat investasi yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan output secara signifikan. Dalam konteks daerah, kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan, seperti dari pajak dan retribusi, sangat menentukan kapasitas pembiayaan pembangunan.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya dari segi jumlah, kualitas tenaga kerja juga menjadi penentu utama produktivitas. Menurut teori human capital, peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan tenaga kerja akan meningkatkan efisiensi dan output ekonomi. Namun, apabila pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, maka akan menimbulkan pengangguran yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Teknologi memungkinkan penggunaan faktor produksi secara lebih optimal sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama. Dalam teori pertumbuhan endogen, teknologi tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga dihasilkan dari aktivitas ekonomi seperti inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan.

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal. Penerimaan daerah

seperti pajak dan retribusi menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, kebijakan fiskal harus dikelola secara optimal. Beban pajak yang terlalu tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi, sementara pengelolaan retribusi yang efektif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sektor riil.

Dalam penelitian ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencerminkan peran kebijakan fiskal daerah dalam menghimpun penerimaan, sedangkan retribusi pasar mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan dan UMKM.

5. Struktur Ekonomi dan Aktivitas Sektor Riil

Struktur ekonomi yang kuat dan beragam akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Aktivitas sektor riil, seperti perdagangan di pasar tradisional, memiliki peran penting dalam mendorong perputaran ekonomi. Tingginya aktivitas perdagangan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat sirkulasi uang dalam perekonomian daerah.

2.1.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Secara umum, PDRB dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku

mencerminkan nilai tambah yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan, sehingga masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu, sehingga mampu menghilangkan pengaruh perubahan harga dan lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil (BPS, 2023; Mankiw, 2019).

PDRB atas dasar harga konstan memiliki peran penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi karena menunjukkan perubahan volume produksi barang dan jasa secara nyata dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan harga konstan, peningkatan nilai PDRB dapat diinterpretasikan sebagai peningkatan output riil, bukan sekadar akibat kenaikan harga. Oleh karena itu, indikator ini digunakan secara luas dalam analisis ekonomi makro untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam praktiknya, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika nilai PDRB meningkat, maka menunjukkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi. Sebaliknya, penurunan nilai PDRB mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi. Dengan demikian, PDRB harga konstan menjadi indikator yang lebih akurat dalam menilai dinamika pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan PDRB harga berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai perkembangan ekonomi daerah, karena

telah menghilangkan pengaruh inflasi. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen seperti PBB-P2, retribusi pasar, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis secara lebih tepat dan empiris.

2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Secara konseptual, desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi (Bird & Vailancourt, 1999)

Dari sisi teori, Wallace E. Oates melalui *Decentralization Theorem* menjelaskan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal (Oates, 1999). Teori ini menekankan bahwa desentralisasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah.

Lebih lanjut, pendekatan fiskal modern menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja ekonomi apabila didukung oleh kapasitas fiskal daerah yang memadai. Artinya, daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat

akan lebih mampu menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Bahl & Bird, 2021).

Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal mencakup dua aspek utama, yaitu sisi penerimaan (*revenue assignment*) dan sisi pengeluaran (*expenditure assignment*). Dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, dari sisi penerimaan, pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan melalui transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri (OECD, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis ditekankan pada sisi penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena komponen ini mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, yang pada akhirnya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Nasir, 2019)

2.1.2.1 Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Secara umum, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah mengalokasikan

sumber daya, mendistribusikan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, keberadaan pemerintah menjadi penting karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Kegagalan pasar (*market failure*), seperti penyediaan barang publik, eksternalitas, dan ketimpangan distribusi pendapatan, menjadi alasan utama perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan keuangan publik.

Menurut Musgrave (1959), fungsi utama keuangan publik terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Function*)

Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien guna mendukung aktivitas ekonomi.

2. Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pemerintah melakukan redistribusi melalui kebijakan pajak dan belanja publik, sehingga kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap dapat mengakses layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk merespons fluktuasi ekonomi.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui dua instrumen utama dalam keuangan publik, yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Dari sisi penerimaan, pemerintah menghimpun dana melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, teori keuangan publik menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghimpun penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, PBB-P2 dan retribusi pasar merupakan bagian dari instrumen penerimaan dalam kerangka keuangan publik daerah. PBB-P2 mencerminkan fungsi distribusi dan alokasi melalui pemungutan pajak atas kepemilikan aset, sedangkan retribusi pasar mencerminkan fungsi alokasi melalui penyediaan layanan publik di sektor perdagangan. Dengan demikian, teori keuangan publik memberikan landasan konseptual dalam menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki dan dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PAD memiliki peran strategis karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Halim & Kusufi, 2022).

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen utama yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan secara mandiri. Keempat komponen tersebut memiliki karakteristik, sumber, serta peran yang berbeda dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama PAD karena bersifat relatif stabil dan memiliki basis pemungutan yang luas. Jenis pajak daerah meliputi antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Dalam konteks penelitian ini, PBB-P2 dipilih karena memiliki basis objek

yang jelas, yaitu tanah dan bangunan, serta mencerminkan nilai ekonomi suatu wilayah. Selain itu, penerimaan dari pajak daerah juga mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal suatu daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki imbalan langsung berupa jasa atau layanan yang diterima oleh masyarakat. Retribusi daerah umumnya dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini, retribusi pasar menjadi fokus karena mampu merepresentasikan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung, khususnya dalam sektor perdagangan lokal. Tingkat penerimaan retribusi pasar dapat mencerminkan intensitas transaksi ekonomi dan tingkat pemanfaatan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan lainnya. Pendapatan ini biasanya berupa dividen, bagian laba, atau hasil investasi lainnya. Meskipun kontribusinya terhadap PAD relatif lebih kecil dibandingkan pajak dan retribusi, komponen ini tetap penting

sebagai indikator kemampuan daerah dalam mengelola aset dan investasi secara produktif. Efektivitas pengelolaan kekayaan daerah dapat mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta strategi investasi pemerintah daerah dalam jangka panjang.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen ini mencakup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun tetap diakui sebagai PAD yang sah. Contohnya meliputi pendapatan bunga, jasa giro, denda administrasi, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun sifatnya tidak selalu rutin dan cenderung fluktuatif, komponen ini tetap memberikan kontribusi tambahan terhadap total PAD dan dapat mencerminkan optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah secara keseluruhan.

Keempat komponen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal stabilitas, kontribusi, dan keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator kapasitas fiskal yang lebih relevan dalam analisis pertumbuhan ekonomi (Martinez-Vazquez & McNab, 2021). Untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fungsi produksi yang dimodifikasi sesuai dengan konteks penelitian.

Dalam model ini, PBB-P2 dan retribusi pasar diperlakukan sebagai bentuk kapital fiskal yang mencerminkan kapasitas keuangan daerah, sementara tenaga kerja mencerminkan kapasitas produksi. Secara teoritis, peningkatan penerimaan PBB-P2 akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, sedangkan peningkatan retribusi pasar mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, peningkatan jumlah tenaga kerja akan memperbesar kapasitas produksi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi.

Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara kapasitas fiskal daerah dan tenaga kerja. Pendekatan ini memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis pengaruh PAD dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi anggaran menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai sumber pendapatan daerah, fungsi regulasi berkaitan dengan peran pajak dalam mengatur aktivitas ekonomi, sedangkan fungsi redistribusi berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 2021).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pajak yang ideal bagi pemerintah daerah adalah pajak yang memiliki basis luas, stabil, mudah dipungut, serta tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang signifikan. Salah satu jenis pajak yang

memenuhi karakteristik tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Wicaksono, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak berbasis aset yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Secara teoritis, pajak properti seperti PBB-P2 dianggap sebagai sumber pendapatan yang stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek. Selain itu, nilai properti biasanya meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah, sehingga penerimaan pajak juga cenderung meningkat (Slack & Bird, 2022).

PBB-P2 juga memiliki keunggulan dari sisi administrasi karena objek pajaknya relatif mudah diidentifikasi dan tidak mudah dipindahkan. Alasan pemilihan PBB-P2 dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teoritis dan empiris. Pertama, PBB-P2 mencerminkan nilai ekonomi wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai indikator kapasitas fiskal daerah. Kedua, sifatnya yang stabil membuat PBB-P2 lebih representatif dalam analisis jangka panjang dibandingkan pajak lain yang lebih sensitif terhadap siklus ekonomi. Ketiga, PBB-P2 memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan dan peningkatan nilai properti. Dengan demikian, PBB-P2 menjadi variabel yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki hubungan langsung dengan manfaat yang diterima oleh pengguna layanan. Dalam teori keuangan publik, retribusi dikategorikan sebagai user charges, yaitu pembayaran yang dikenakan kepada pengguna layanan publik berdasarkan prinsip manfaat (*benefit principle*) (Saprudin, 2018).

Retribusi daerah memiliki fungsi utama sebagai sumber pembiayaan layanan publik serta sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan layanan. Dengan adanya retribusi, masyarakat akan menggunakan layanan publik secara lebih efisien karena harus membayar sesuai dengan tingkat pemanfaatannya. Selain itu, retribusi juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan tersebut (Bahl et al., 1984).

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada retribusi pasar, yaitu pungutan yang dikenakan atas penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan. Secara teoritis, retribusi pasar mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi lokal, karena penerimaannya bergantung pada jumlah pedagang dan transaksi yang terjadi di pasar.

Alasan pemilihan retribusi pasar sebagai variabel penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, retribusi pasar memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil, khususnya sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian daerah. Kedua, retribusi pasar bersifat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga dapat

digunakan untuk menangkap dinamika ekonomi jangka pendek. Ketiga, data retribusi pasar relatif tersedia dan dapat dibandingkan antar daerah.

Dengan demikian, retribusi pasar tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai indikator aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan penerimaan retribusi pasar menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Supiati et al., 2021)

2.1.3 Penduduk

Penduduk merupakan konsep dasar dalam analisis ekonomi pembangunan karena menjadi sumber utama pembentukan tenaga kerja dan sekaligus penentu dinamika permintaan agregat. Secara definisi, penduduk adalah seluruh individu yang menetap di suatu wilayah dalam periode tertentu dan memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam pendekatan klasik, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan sumber daya, sehingga dapat menimbulkan tekanan terhadap perekonomian (Malthus, 1798). Meskipun bersifat klasik, teori ini tetap relevan dalam menjelaskan pentingnya pengelolaan jumlah penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi.

Dalam perkembangan teori modern, penduduk tidak lagi dipandang semata sebagai beban, tetapi sebagai aset ekonomi yang potensial. Perspektif ini diperkuat oleh teori *demographic dividend* yang menyatakan bahwa peningkatan proporsi penduduk usia produktif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila

didukung oleh kebijakan yang tepat (Lee & Mason, 2021). Artinya, struktur umur penduduk menjadi faktor penting dalam menentukan potensi ekonomi suatu wilayah. Penduduk usia produktif memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan berkontribusi terhadap produksi.

Selain itu, pendekatan ekonomi makro kontemporer menekankan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat menciptakan dua efek utama, yaitu efek penawaran (*supply effect*) melalui peningkatan tenaga kerja, serta efek permintaan (*demand effect*) melalui peningkatan konsumsi (Weil, 2022). Dengan demikian, penduduk menjadi fondasi utama dalam pembentukan tenaga kerja yang akan menentukan kapasitas produksi suatu daerah. Dengan demikian, penduduk tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses produksi ekonomi. Dalam konteks ini, bagian dari penduduk yang berada pada usia produktif akan membentuk angkatan kerja yang menjadi faktor produksi utama dalam perekonomian.

2.1.3.1 Teori Kependudukan Malthus

Teori kependudukan yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus merupakan salah satu teori klasik yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya ekonomi. Dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798), Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan dan sumber daya lainnya.

Menurut Malthus, jumlah penduduk cenderung tumbuh secara geometrik (2, 4, 8, 16, dan seterusnya), sedangkan produksi pangan hanya meningkat secara

aritmetik (1, 2, 3, 4, dan seterusnya). Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya ini akan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian, terutama dalam bentuk kelangkaan pangan, kemiskinan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Malthus menjelaskan adanya mekanisme pengendalian pertumbuhan penduduk yang disebut sebagai *checks*, yang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *positive checks*, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan angka kematian seperti kelaparan, penyakit, dan bencana alam. Kedua, *preventive checks*, yaitu upaya pengendalian yang dilakukan secara sadar oleh manusia, seperti penundaan pernikahan dan pembatasan jumlah kelahiran.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, teori Malthus menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Tingginya jumlah penduduk akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya, memperbesar beban tanggungan, serta menurunkan pendapatan per kapita. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlambat proses pembangunan ekonomi.

Meskipun teori Malthus bersifat klasik, relevansinya masih dapat ditemukan dalam konteks modern, terutama dalam menjelaskan permasalahan kependudukan di negara berkembang. Namun demikian, perkembangan teori ekonomi modern menunjukkan bahwa penduduk tidak selalu menjadi beban, melainkan dapat menjadi potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik. Konsep ini kemudian berkembang menjadi teori *demographic dividend*, yang menekankan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja.

Dalam konteks penelitian ini, teori Malthus memberikan dasar pemikiran bahwa peningkatan jumlah penduduk, yang kemudian tercermin dalam peningkatan angkatan kerja, tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka akan menimbulkan pengangguran dan menekan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

2.1.3.2 Teori *Demographic Dividend*

Teori *demographic dividend* merupakan salah satu pendekatan modern dalam ekonomi pembangunan yang menjelaskan hubungan antara struktur penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pandangan klasik Malthus yang menekankan penduduk sebagai beban, teori ini melihat perubahan komposisi penduduk sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan.

Secara konseptual, *demographic dividend* adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini menciptakan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Dengan kata lain, perubahan struktur demografi dapat menghasilkan “bonus” ekonomi apabila dikelola secara optimal.

Menurut Lee dan Mason (2021), *demographic dividend* terjadi melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, peningkatan jumlah penduduk usia produktif akan memperbesar penawaran tenaga kerja (*labor supply*), sehingga kapasitas produksi ekonomi meningkat. Kedua, penurunan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, karena beban tanggungan terhadap penduduk non-produktif menjadi lebih kecil. Ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi, sehingga memperkuat permintaan agregat dalam perekonomian.

Lebih lanjut, *demographic dividend* tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada kualitas kebijakan dan kondisi ekonomi suatu wilayah. Untuk dapat memanfaatkan bonus demografi, diperlukan dukungan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan jumlah penduduk usia produktif justru dapat menimbulkan pengangguran dan menjadi beban bagi perekonomian.

Dalam perspektif ekonomi makro, *demographic dividend* menciptakan dua efek utama, yaitu *supply effect* dan *demand effect*. *Supply effect* terjadi melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan output produksi. Sementara itu, *demand effect* terjadi melalui peningkatan konsumsi masyarakat akibat meningkatnya pendapatan. Kombinasi kedua efek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Namun demikian, terdapat pula risiko yang menyertai fenomena ini. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan

lapangan kerja yang memadai, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas dan daya beli masyarakat, sehingga justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, teori *demographic dividend* menjadi penting karena variabel yang digunakan adalah tenaga kerja yang diproksikan dalam jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan representasi langsung dari penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah angkatan kerja seharusnya menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila tidak terserap secara optimal dalam pasar kerja, peningkatan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam perekonomian yang berperan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi pembangunan, tenaga kerja tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas yang mencerminkan tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi determinan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Secara konseptual, tenaga kerja berasal dari angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja mencerminkan ketersediaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Semakin besar angkatan

kerja, semakin besar pula potensi produksi yang dapat dihasilkan, selama tenaga kerja tersebut dapat terserap secara optimal dalam pasar kerja.

Dalam teori ekonomi pembangunan, salah satu pendekatan penting adalah model Lewis (1954) tentang transformasi struktural. Lewis menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif. Proses ini akan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan karena tenaga kerja digunakan secara lebih efisien.

Selanjutnya, Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa keputusan individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh peluang kerja dan tingkat upah yang diharapkan. Dalam model ini, tenaga kerja akan berpindah ke sektor atau wilayah yang menawarkan peluang ekonomi lebih baik. Namun, apabila pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, teori Human Capital yang dikembangkan oleh Becker (1993) menekankan bahwa kualitas tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang lebih tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitasnya.

Dalam perspektif makroekonomi, tenaga kerja memberikan dua dampak utama terhadap perekonomian. Pertama, sebagai faktor produksi, tenaga kerja meningkatkan kapasitas output melalui peningkatan jumlah pekerja (*labor supply*).

Kedua, sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja juga berperan dalam meningkatkan konsumsi (*demand side*), sehingga mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas dan daya beli masyarakat, sehingga justru memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, variabel tenaga kerja diproksikan menggunakan jumlah angkatan kerja, yang mencerminkan penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah angkatan kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila tidak terserap secara optimal, peningkatan tersebut dapat menjadi beban bagi perekonomian daerah.

2.1.4 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel independen, yaitu PBB-P2, retribusi pasar, dan tenaga kerja (angkatan kerja) terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan. Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan keuangan publik, pertumbuhan ekonomi, serta teori tenaga kerja.

2.1.4.1 Hubungan PBB-P2 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam teori keuangan publik, pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menghimpun dana guna membiayai pembangunan dan penyediaan barang publik (Musgrave, 1959). Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PBB-P2 secara teoritis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan layanan publik.

Namun, dari sisi lain, pajak juga dapat menimbulkan efek distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Beban pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan investasi, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara PBB-P2 dan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana kebijakan pajak tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

2.1.4.2 Hubungan Retribusi Pasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk penerimaan daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, peningkatan penerimaan retribusi pasar mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor riil, seperti perdagangan barang dan jasa.

Secara teoritis, retribusi pasar memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena meningkatnya aktivitas pasar akan mendorong perputaran barang, jasa, dan modal, sehingga menciptakan efek

pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Selain itu, pasar tradisional berfungsi sebagai pusat distribusi yang menghubungkan produsen dan konsumen, sehingga peningkatan aktivitas pasar akan memperkuat struktur ekonomi lokal.

2.1.4.3 Hubungan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja yang diprosikan melalui jumlah angkatan kerja merupakan faktor produksi utama dalam perekonomian. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2019).

Namun, berdasarkan teori kependudukan dan pasar tenaga kerja, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu berdampak positif. Apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang dapat menurunkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Malthus dan pendekatan demographic dividend, yang menekankan bahwa jumlah penduduk usia produktif hanya akan memberikan manfaat apabila terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, hubungan antara angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada tingkat penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja.

2.1.4.4 Hubungan Simultan Antar Variabel

Secara simultan, PBB-P2, retribusi pasar, dan tenaga kerja saling berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penerimaan daerah dari pajak dan retribusi memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai

pembangunan, sementara tenaga kerja berperan sebagai faktor produksi yang menentukan tingkat output ekonomi.

Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, ketiga variabel tersebut mencerminkan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal daerah dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kombinasi antara pengelolaan fiskal yang optimal dan pemanfaatan tenaga kerja yang efektif akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam menyusun kerangka analisis. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja. Selain itu, kajian terdahulu juga menjadi referensi bagi penulis dalam memahami hubungan antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, serta jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Penulis dan Tahun	Metode Penelitian, Jenis dan Nama Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>“Determination of Economic Growth of City and Districts in West Java”</i>	Regresi data panel; Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi; Variabel	Menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi kab/kota	Variabel ekonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap

	(Ayu & Septiani, 2020)	Independen (X): Indikator ekonomi daerah (fiskal & tenaga kerja)		pertumbuhan ekonomi
2	“Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (Barimbing & Karmini, 2015)	Regresi linier; Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi; Variabel Independen (X): PAD, Tenaga Kerja, Investasi	Menguji faktor pertumbuhan ekonomi daerah	PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan
3	“Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (Priambodo, 2016)	Regresi panel FEM; Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi; Variabel Independen (X): PAD, Belanja Modal, Tenaga Kerja	Menguji pengaruh fiskal daerah dan tenaga kerja	PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan
4	“Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (Putri & Woyanti, 2024)	Regresi panel FEM; Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi; Variabel Independen (X): : Tenaga Kerja	Menguji peran tenaga kerja	Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan
5	“Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (Diu et al., 2026)	Regresi panel REM; Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi; Variabel Independen (X): Tenaga Kerja	Menganalisis dampak tenaga kerja	Tenaga kerja berpengaruh negatif (mismatch pasar kerja)

6	“Analisis Penerimaan PBB-P2 dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah” (Setiawan et al., 2020)	Regresi panel; Variabel Dependen (Y): PAD; Variabel Independen (X): PBB-P2	Menguji pengaruh PBB-P2 terhadap PAD	Menguji pengaruh PBB-P2 terhadap PAD
7	“Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD” (Putri & Adi, 2023)	Analisis panel/deskriptif; Variabel Dependen (Y): PAD; Variabel Independen (X): PBB-P2	Mengukur efektivitas pajak daerah	PBB-P2 efektif dalam meningkatkan PAD
8	“Analisis Pengelolaan PBB-P2 terhadap Peningkatan PAD” (Ramadayanti et al., 2022)	Analisis kuantitatif; Variabel Dependen (Y): PAD; Variabel Independen (X): PBB-P2	Menganalisis pengelolaan pajak daerah	Pengelolaan PBB-P2 meningkatkan PAD
9	“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD” (JASMien, 2025)	Analisis kuantitatif; Variabel Dependen (Y): PAD; Variabel Independen (X): Retribusi Pasar	Mengukur kontribusi retribusi pasar	Retribusi pasar berpengaruh positif terhadap PAD
10	“Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD” (Rahmawati, 2020)	Analisis kuantitatif; Variabel Dependen (Y): PAD; Variabel Independen (X): Retribusi Daerah	Menguji peran retribusi	Retribusi berpengaruh positif namun lebih kecil dari pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

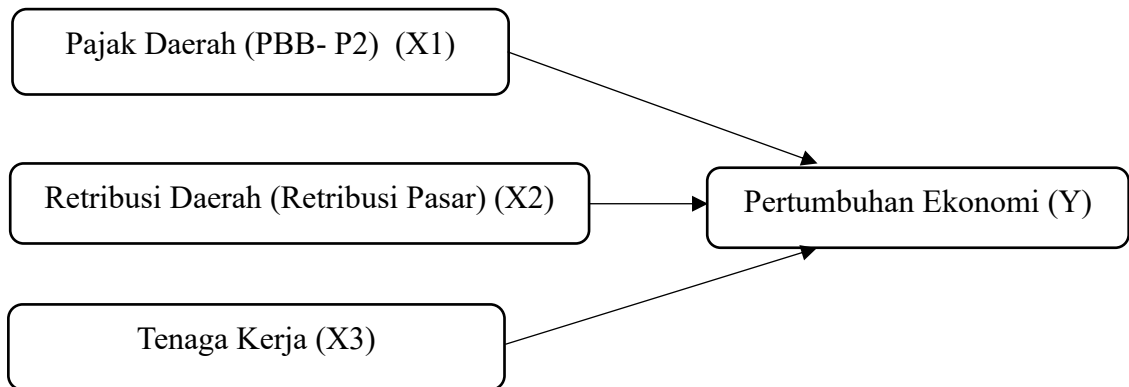
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara variabel independen, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan tenaga kerja (angkatan kerja) terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor produksi dan kebijakan ekonomi daerah. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, faktor internal seperti kebijakan fiskal daerah dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan output ekonomi.

PBB-P2 sebagai salah satu komponen pajak daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan dari PBB-P2 mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperlancar aktivitas produksi serta distribusi, sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dari sisi lain, PBB-P2 juga berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Apabila beban pajak terlalu tinggi, maka dapat menurunkan daya beli dan menghambat investasi, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Peningkatan penerimaan retribusi pasar mencerminkan tingginya aktivitas transaksi, perputaran barang, dan mobilitas modal di tingkat lokal. Dalam konteks ini, retribusi pasar tidak hanya berfungsi sebagai sumber PAD, tetapi juga sebagai indikator vitalitas sektor riil. Aktivitas pasar yang tinggi akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tenaga kerja yang diproksikan melalui jumlah angkatan kerja merupakan faktor produksi utama dalam perekonomian. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruh tersebut sangat bergantung pada kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang dapat menurunkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Kondisi ini justru dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB-P2, retribusi pasar, dan tenaga kerja memiliki hubungan yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel tersebut dapat memberikan pengaruh positif apabila dikelola secara optimal, namun juga berpotensi memberikan dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- X1, X2, X3 → Variabel independen
- Y → Variabel dependen
- Semua variabel independen berpengaruh langsung terhadap Y

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban awal terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya melalui analisis data. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut::

1. Diduga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013–2025.

2. Diduga retribusi pasar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013–2025.
3. Diduga jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013–2025.
4. Diduga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi pasar, dan jumlah angkatan kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013–2025.